



► REGULASI RAMADAN

Ormas Dilarang Merazia Warung Makan

Lugas Subarkah, Ujang Hasanudin,
& Yosef Leon
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Organisasi kemasyarakatan (ormas) dilarang merazia warung makan yang buka pada siang hari.

Larangan itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, sesuai mengikuti *video conference* bersama Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan. Terdapat aturan kegiatan yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama Ramadan, mengingat bulan puasa tahun ini masih dalam kondisi pandemi.

Menurut Sultan, persoalan razia atau *sweeping* sudah diantisipasi kepolisian. Sultan juga akan mengeluarkan regulasi mengenai

kegiatan selama Ramadan. "Tidak perlu *sweeping* selama sebagainya nanti ada dalam aturan. Detailnya nanti keluar. Mungkin [aturan] enggak terlalu lama karena besok [hari ini] sudah mulai puasa. [aturan akan] mengatur salat, puasa, tarawih dan sebagainya," kata Sultan kepada wartawan di kompleks Kepatihan, Jogja, Senin (12/4).

Sultan menambahkan aturan dalam berkegiatan selama Ramadan bagi masyarakat sebagai antisipasi penularan Covid-19. Menurut Sultan aturan tersebut baru keluar dari Pemerintah Pusat dan segera ditindaklanjuti.

Antisipasi Pemudik

Menyikapi aturan larangan mudik, Pemda DIY akan

menggelar operasi penyekatan di perbatasan. Rencananya didirikan 10 pos penyekatan untuk mengantisipasi pemudik masuk ke Bumi Mataram.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad, mengatakan penyekatan di setiap perbatasan DIY dilakukan pada 6-17 Mei mendatang.

► Halaman 10

Ormas Dilarang...

Penyekatan dilakukan di 10 titik, di antaranya di Prambanan, Tempel, Temon, dan sejumlah jalur tikus atau jalur alternatif yang kemungkinan dilintasi pemudik.

Ia menyatakan Pemerintah Pusat sudah melarang mudik sehingga Pemda DIY menindaklanjutinya dengan mengawasi wilayah perbatasan. Selain mengawasi perbatasan, Satpol PP dan Linmas juga akan mengawasi pemudik yang lolos dari pengawasan. "Satpol PP dan Linmas melakukan penjagaan di tingkat mikro untuk pemudik yang lolos. Satgas desa akan memantau (pemudik yang lolos agar melakukan) karantina lima hari," ujar Noviar di kompleks Kepatihan, Senin.

Guna mencegah pemudik, Polda DIY menggelar operasi *Keselamatan Progo-2021* yang bakal dilaksanakan selama 14 hari terhitung mulai 12-25 April 2021. Selain penegakan aturan lalu lintas dan protokol kesehatan, fokus petugas akan dikerahkan dalam menyosialisasikan larangan mudik pada Lebaran mendatang.

Dir Lantas Polda DIY, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan operasi *Keselamatan Progo-2021* digelar bersama Satgasda dan Satgasres dengan didukung sejumlah instansi terkait lainnya. Operasi kali ini akan mengedepankan tindakan *pre-emptive* dan preventif disertai persuasi yang humanis untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berkendara.

"Operasi ini akan melibatkan 980 personel yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Larangan mudik akan menjadi fokus kami pada operasi kali ini," kata Iwan.

Kepala Seksi Pengelolaan Terminal Wates dan Jombor, Dinas Perhubungan DIY, Yuniarti,

menjelaskan di Terminal Jombor terjadi peningkatan jumlah penumpang pada Sabtu dan Minggu (10-11/4) lalu. "Khususnya untuk jalur lintas Sumatra," ujarnya.

Salah satu pemudik di luar Lebaran, Robandi, berdomisili di Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Sleman, memutuskan mudik lebih awal karena khawatir saat Lebaran malah tidak bisa mudik.

Warga asli Cirebon, Jawa Barat, ini mengaku tidak mengkhawatirkan soal pekerjaan karena memang memungkinkan dikerjakan dari kampung halaman. "Dari kantor dapat keringanan, bisa dikerjakan di rumah," ungkapnya.

Kepala UPT Terminal Giwangan Jogja, Bakti Zunanta mengatakan meski pemerintah telah menetapkan larangan mudik pada hari raya besar keagamaan tahun ini, tetapi minat masyarakat untuk mudik dinilainya masih akan tinggi. Kenaikan jumlah penumpang di terminal pun diperkirakan akan berlangsung pada dua pekan menjelang Lebaran. "Belum ada kenaikan penumpang. Ini masih sepi sama seperti tahun lalu," kata Bakti.

Sama seperti tahun lalu, menjelang Ramadan kali ini jumlah bus yang masuk maupun keluar di terminal tipe A tidak terlalu signifikan. Selain karena pandemi, kondisi ini diduga akibat moda bus tidak lagi menjadi pilihan utama yang digunakan para penumpang dalam bepergian.

Bakti menjelaskan di masa pandemi jumlah bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang beroperasi di tempat itu hanya sekitar 400 unit, sedangkan untuk layanan antarkota dalam provinsi (AKDP) hanya sejumlah 80-90 unit.

"Operasional bus hanya sekitar

25 persen dibanding kondisi normal. Saat normal kami bisa melayani sebanyak 1.000 unit bus untuk AKAP," jelasnya.

Imbasnya, jumlah penumpang pun otomatis berkurang drastis. Bakti mengatakan jumlah penumpang yang masuk maupun keluar di terminal Giwangan hanya berjumlah sekitar 3.000-3.400 orang per hari.

Terminal Normal

Kepala Satuan Pelayanan Terminal Dhaksinarga Wonosari, Sularjo, memastikan belum ada lonjakan penumpang yang turun di terminal. "Total ada 72 kendaraan tercatat. Tapi setiap harinya yang beroperasi ada 40 dan sekarang belum ada penambahan," kata Sularjo.

Menurut dia, adanya kebijakan pelarangan mudik akan berdampak terhadap pola kepulangan perantau. Oleh karenanya, para pemudik akan pulang lebih awal untuk menyesuaikan aturan. "Sekarang kondisinya masih normal," katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan Direktur Operasional PO Maju Lancar, Adi Prasetyo. Menurut dia, potensi pemudik pulang lebih awal sangat mungkin. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kenaikan penumpang yang pulang ke wilayah Gunungkidul.

Ia memprediksi kenaikan baru terlihat mulai pekan ketiga April hingga aturan larangan mudik diberlakukan. "Kemungkinan 20 April mulai ada peningkatan. Awal-awal puasa masih sepi," katanya.

Kondisi yang sama terjadi di Bantul. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Aris Suharyanta menyatakan tidak ada kenaikan penumpang di Terminal Palbapang maupun Terminal Imogiri. (Catur Dwi Janati & David Kurniawan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Terminal			

3. Sat Pol PP			
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005